



Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Menyusul, Lima Pegawai Setwan Denpasar akan Diperiksa

Denpasar (Bali Post) -

Penyidik intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar terus mengembangkan pemeriksaan dugaan penyimpangan perjalanan dinas di Kota Denpasar. Setelah memeriksa dua pejabat yakni Kepala Bagian Umum Putu Darma Wijaya dan Bendahara Pengeluaran Nyoman Astina, pekan ini lima orang pegawai Sekretariat Dewan (Setwan) akan dimintai keterangan.

Hal itu dibenarkan Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir, Minggu (24/5) kemarin. "Ya, kami akan panggil lima orang ini bergiliran, dari Senin, Selasa dan Rabu. Tiap hari kami panggil dua, mungkin terakhir satu," katanya.

Dikatakannya, pihaknya telah memasang target dua minggu setelah dinaikkannya kasus ini dari pengumpulan data dan keterangan menjadi penyelidikan. Dipanggilnya para pejabat dari Sekretariat DPRD ini, sangat penting karena menjelaskan aliran dana dan penggunaan anggaran dari APBD. Penyidik sedang membentuk alur yang jelas mengenai keberadaan anggaran yang digunakan. Bahkan, tercatat satu perjalanan dinas dianggarkan sampai ratusan juta rupiah.

"Ini akan kami dalam, karena satu tahun anggaran menyentuh dana hingga Rp 12 miliar," ungkap Syahrir. Hanya, nama-nama saksi belum diungkapkannya. (kmb37)

Edisi : Senin, 25 Mei 2015

Hal : 3



Kasus GOR Nusa Penida

Kejari Klungkung Libatkan KPK

Semarapura (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus korupsi yang terjadi pada pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Nusa Penida. Kerja sama ini diambil untuk menentukan kerugian negara. Saat ini, penyidik Kejari Klungkung sudah memegang dua alat bukti.

Kepala Kejari Klungkung Totok Bambang Sapto Dwijo saat didampingi Kepala Cabang Kejari Nusa Penida I Dewa Made Mertayasa mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang melakukan kerja sama dengan KPK untuk mengungkap Kasus korupsi GOR Nusa Penida, Desa Batununggul, Klungkung. Menurut Totok Bambang, kerja sama ini ditunjukkan untuk mendapatkan hasil

infestigasi dari ahli kontruksi.

Pasalnya dalam menentukan besarnya kerugian negara, dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali membutuhkan hasil pemeriksaan dari ahli kontruksi. "Ahli yang kami harapkan itu dari teknik sipil. Kami sudah mengajukan ke BPKP tapi dari BPKP kesulitan karena belum mendapatkan hasil dari tim

tekniknya," jelasnya.

Ahli kontruksi ini diminta langsung ke KPK agar tidak terjadi intervensi dalam upaya mengungkap kasus korupsi tersebut. Nantinya, KPK langsung menunjuk dari perguruan tinggi mana tim ahli yang akan melakukan pemeriksaan. "Dari KPK sudah mempersilakan untuk melakukan pengajuan namun saya diminta untuk mengekspose bersama bagaimana kerangka dan kronologi kasus ini terjadi," ujarnya.

Pihaknya memastikan proyek yang didanai dari bansos dan hibah ini bisa terus berlanjut. Mengingat penyidik dari Kejari telah mengantongi dua alat bukti yang men-



Bali Post/kmb

GOR - Pembangunan GOR Nusa Penida, Klungkung mangkrak. Untuk mengungkap dugaan kasus korupsi pembangunan GOR ini, Kejari Klungkung bekerja sama dengan KPK.

Edisi : Senin, 25 Mei 2015

Hal : 16



kuatkan terjadinya kasus korupsi tersebut. Hanya saja kasus yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan tersebut, belum ada yang berstatus sebagai tersangka. Pada minggu ini, rencananya Kejari kembali melakukan pemeriksaan tambahan kepada sejumlah saksi lainnya.

Totok Bambang menegaskan, tidak ada intervensi dari mana pun terkait dengan kasus korupsi GOR Nusa Penida. Pihaknya pun akan pasang badan bila ada upaya dari pejabat menghambat proses penyelidikan kasus ini. Apalagi, kasus tersebut tidak sesulit kasus lainnya yang ditangani Kejari Klungkung. (dwa)



*Totok Bambang
Sapto Dwijo*



Kuta Bergerak

Tolak Reklamasi Lewat Musik

PENOLAKAN terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa kembali bergema di Kuta, Minggu (24/5) malam kemarin. Sebuah konser musik bertajuk "Kuta Bergerak" digelar di Twice Bar, Gang Poppies 2, Kuta. Konser yang digagas masyarakat Desa Adat Kuta ini sejatinya merupakan acara penggalan dana atau *charity concert* untuk Nepal. Namun di sela-sela acara juga diisi pernyataan sikap dari masyarakat Kuta yang tergabung dalam Forum Kuta Perjuangan.

"Konser ini sebagai bentuk kepedulian terhadap bencana Nepal dan kepedulian kami terhadap lingkungan melalui media musik," ujar Koordinator Forum Kuta Perjuangan, Gung Jhon. Pengisi acara yang tampil dalam konser "Kuta Bergerak" di antaranya Superman Is Dead, Scared of Bums, The Hydrant, The Dissland, The Djihad, Nosstress, White Rose, 4WD, Discotion Pill, dan The Hidden. Selain itu, tampil juga komika Ernest Prakasa lewat *stand up comedy*.

"Bisa dikatakan konser ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan masyarakat Bali melawan rencana reklamasi Teluk Benoa," lanjut Gung Jhon. Forum Kuta Perjuangan sebelumnya sering menyuarakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Di antaranya dengan memasang baliho tolak reklamasi di sejumlah titik.

Sementara itu, penolakan reklamasi Teluk Benoa melalui acara musik sebelumnya digelar di Lingkar Art Jalan Gatot Subroto. Bertajuk "Kita Peduli", acara musik ini digelar PICA-Komunitas Clothing Denpasar pada Sabtu (23/5). (kmb32)

Edisi : Senin, 25 Mei 2015

Hal : 1



Penataan Objek Wisata Ceking Badan Pengelola Tunggu

Langkah Pemkab Gianyar

Gianyar (Bali Post) -

Penataan objek wisata Ceking, Tegallalang, Gianyar terus bergulir. Badan pengelola telah menjabarkan instruksi Pemkab Gianyar untuk melakukan pendataan bangunan. Kini, dari puluhan bangunan yang ada di lokasi, tiga pemilik yang bangunannya dikategorikan melanggar telah menanda-

tangani pernyataan bersedia mengikuti kebijakan Pemkab Gianyar.

"Badan pengelola kini menunggu langkah Pemkab Gianyar melakukan penertiban. Kami berharap rencana ini bisa segera terealisasi agar program penataan bisa dilakukan," ujar Bendesa Pakraman Desa Tegallalang Pande Wayan Karsa,

parkir Ceking, ia mengatakan akan dioptimalkan. Selama ini para sopir masih enggan masuk sentral parkir karena berbagai kendala. "Ke depan, kami akan optimalkan penggunaan sentral parkir. Selain melengkapi fasilitas, kami juga akan melakukan evaluasi pengelolaan," ujarnya.

Ia berharap untuk menghindari kemacetan di jalur ini, para sopir travel masuk sentral parkir sehingga tidak memarkir kendaraan di badan jalan. Sentral parkir ini, katanya, dibuat secara swadaya oleh desa pakraman untuk mengantisipasi kemacetan. Kini, setelah sentral parkir tersedia, pemanfaatannya belum optimal. "Ini yang akan kami cari solusi. Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait demi kenyamanan wisatawan yang datang ke objek wisata ceking," ujarnya. Desa Pakraman Tegallalang menyediakan lahan parkir seluas 33 are untuk mengatasi kemacetan di jalur kawasan wisata Ceking. Pengadaan lahan dan pentaan areal parkir menelan dana sekitar Rp 4 miliar. (kmb)



Bali Post/kmb

CEKING - Objek wisata Ceking kini terus berbenah. Pemkab Gianyar berjanji melakukan pendataan bangunan yang melanggar jalur hijau di kawasan ini. Langkah ini diharapkan segera terealisasi agar penataan kawasan bisa segera dilakukan.

Minggu (24/5) kemarin.

Ia mengatakan pihak badan pengelola, sekitar November 2014 sudah dipanggil Sekkab Gianyar untuk mengoordinasikan masalah ini. Kini, setelah enam bulan berlalu, badan pengelola berharap Pemkab Gianyar melakukan tindak lanjut.

Sementara itu, terkait dengan rencana pembuatan trotoar di jalur ini, Ir. Wayan Sukarma yang membidangi perencanaan pengembangan objek wisata Ceking mengatakan tinggal menunggu realisasi. Trotoar ini diharapkan memberi ke-

nyamanan bagi pengunjung. Selain itu, katanya, pihak Dishub Gianyar sudah memasang rambu-rambu lalu lintas di kawasan ini. "Sejumlah rambu pengaturan lalu lintas sudah terpasang di lokasi. Kami berharap ke depan, objek wisata Ceking bisa bebas dari kemacetan," ujarnya.

Ia juga berharap ada langkah lanjutan dari Pemkab Gianyar untuk menertibkan bangunan yang melanggar kawasan jalur hijau di objek wisata ini.

Sementara itu, terkait dengan pengoperasian sentral



Sengketa Lahan 162 Hektar

Desa Sakti Minta Dibagi Dua

Semarapura (Bali Post) -

Kasus sengketa lahan yang mewarnai pemindahan Dusun Sompang dari Desa Sakti, Nusa Penida ditangani lewat jalan tengah. Pihak Desa Sakti yang sebelumnya menjadi induk dari Dusun Sompang meminta agar lahan seluas 162 hektar yang menjadi sengketa dibagi dua. Desa Sakti pun menunggu persetujuan dari Dusun Sompang yang sudah masuk ke Desa Bunga Mekar setelah melepaskan diri dari Desa Sakti.

Ketua DPRD Klungkung sekaligus tokoh Desa Sakti I Wayan Baru mengungkapkan, Desa Sakti telah menerima pendekatan dari Pemkab Klungkung terkait upaya menyelesaikan permasalahan pindahnya Dusun Sompang yang saat ini masih terganjal.

Menurutnya, terganjalnya pemindahan Dusun Sompang ini terjadi

akibat sengketa lahan seluas 162 hektar antara Dusun Sompang dan Desa Sakti. Menurutnya sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tanah seluas 162 hektar tersebut masih berada di Desa Sakti.

Ini dipastikan dari bukti SPPT yang masih dipegang pihak Desa Sakti dan menurutnya dibayarkan tiap tahun. Wayan Baru menambahkan, sudah ada upaya dari pihak Desa Sakti untuk mencari jalan tengah terkait keberadaan tanah yang dulunya milik negara ini. Namun dari Dusun Sompang masih merespons dingin pintu diplomatis yang dilakukan Desa Sakti. "Kami sudah meminta agar dibagi dua. Namun dari Dusun Sompang menginginkan agar Desa Sakti hanya mendapatkan lahan 5 hektar saja," tuturnya.

Pihaknya menuding, ada upaya dari oknum di Dusun Sompang

untuk menjual lahan tersebut ke orang luar. Sesuai dengan penelusuran dari pimpinan di DPRD tersebut, sedikitnya ada 40 hektar lahan yang sudah dijual ke luar desa. Ia pun meminta agar Pemkab Klungkung menelusuri kasus jual beli tanah negara ini. "Kami tetap dengan komitmen 50-50, jelas saja menolak mau diberikan hanya 5 hektar," ujarnya.

Sengketa yang terjadi antara Dusun Sompang dan Desa Sakti menyebabkan Desa Bunga Mekar yang kini menjadi induk dari Dusun Sompang terkena getahnya. Akibat tidak tuntasnya kasus antara Dusun Sompang dan Desa Sakti, Desa Bunga Mekar tidak bisa melaksanakan pemilihan perbekel (Pikel). Desa Bunga Mekar yang seharusnya bisa melangsungkan pikel 22 Maret lalu hingga kini molor dua bulan lebih. (dwa)